

Pengelola Jatiluhur Dinilai Sengaja Banjiri Karawang

PEMERINTAH Kabupaten Karawang, Jawa Barat menilai bahwa Perusahaan Jasa Tirta II (PJT II) Jatiluhur telah sengaja dan dinilai lalai dalam penanggulangan ancaman meluapnya Waduk Jatiluhur sehingga wilayah Karawang terendam banjir dan menimbulkan kerugian besar.

Bupati Kabupaten Karawang Dadang S Muchtar mengatakan, ada faktor kesengajaan dan kelalaian di dalamnya. PJT II yang membuang air dan rakyat Karawang menjadi korban. "Pemerintah pusat seharusnya memberikan kondisi riil. Seperti sistem penanggulangan teknis yang dibangun sebelumnya ternyata belum dilaksanakan dengan baik," Dadang S Muchtar kepada wartawan ketika menghadiri rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Jabar di Bandung, akhir pekan lalu.

Dia menyebutkan, saat ini bantuan yang diterima Kabupaten Karawang untuk penanganan korban banjir secara total mencapai Rp1,8 miliar. Dana tersebut digunakan untuk penanggulangan sesaat seperti memberikan minuman, makanan, dan keperluan lainnya bagi pengungsi.

Dadang memaparkan secara geografis Karawang dikelilingi oleh Sungai Citarum berbentuk huruf U. Di sungai tersebut terdapat empat filter bendungan, yakni bendungan Saguling, Cirata, Ir H Djuanda Jatiluhur.

Filter keempat adalah curug dan lahan milik warga wilayah Karawang. "Bendungan tersebut berada di bawah pengelolaan Perum Jasa Tirta II. Setiap bendungan memiliki ambang batas pemeliharaan, seperti ketinggian Saguling 640 meter, Cirata (220 meter), dan Jatiluhur 107 meter," ujarnya.

Dia menyebutkan, dahulu ada koordinasi untuk masalah ketinggian air. Ketinggian air diatur dengan acuan kebutuhan irigasi Karawang, Purwakarta, dan Subang, dan sekitarnya.

Namun kini, dengan berubah menjadi BUMN masing-masing pengelola bendungan berdiri sendiri sehingga tidak ada koordinasi. "Ketika debit air Saguling naik, mereka membuangnya ke Cirata. Air Waduk Cirata naik, mereka membuang ke Jatiluhur. Sehingga, begitu Jatiluhur naik, mau tidak mau maka harus dibuang," ucapnya.

Menurut Ketua Harian Satuan Tugas Koordinasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang, Arifin Kertasaputra, banjir yang sempat terjadi selama sepekan itu telah merendam puluhan ribu rumah di 10 kecamatan.

Dadang tidak melarang warganya untuk melakukan *class action* kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap banjir tersebut. "Ini perlu dilakukan sebagai kritik terhadap buruknya sistem pengelolaan waduk," kata bupati.

Sementara itu, Direktur Utama PJT II Djendam Guru Singa dan Direktur Teknik Ahmad Gozali belum bisa dikonfirmasi terkait tuduhan bupati tersebut. Telepon seluler milik keduanya tidak bisa dihubungi.